

ANALISIS FRAMING BERITA REKLAMASI TELUK BENOA PADA HARIAN *KOMPAS* DAN *BALI POST* EDISI JUNI 2013-DESEMBER 2014

FRAMING ANALYSIS OF REPORTS ON RECLAMATION OF BENOA BAY IN BALI ON DAILY *KOMPAS* AND *BALI POST* OF JUNE 2013-DECEMBER 2014

Ni Wayan Primayanti, Reni Nuraeni, Rana Akbari Fitriawan

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom
primayanti31@gmail.com, renz_ns@yahoo.com, ranaakbarifitriawan@gmail.com

ABSTRAK

Keterpusatan pembangunan daerah pariwisata di bagian selatan Pulau Bali memunculkan kebutuhan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata. Namun, pengembangan ini terhalang oleh keterbatasan lahan sehingga memunculkan ide untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan di daerah pasang surut Teluk Benoa dengan melakukan reklamasi. Pengeluaran izin prinsip pemanfaatan daerah kawasan Teluk Benoa oleh Gubernur Bali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagai media massa cetak, *Kompas* dan *Bali Post* turut berperan memberitakan polemik yang terjadi mengenai isu reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita reklamasi Teluk Benoa pada harian *Kompas* dan *Bali Post*. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode penelitian kualitatif. Analisis framing dilakukan dengan model analisis Robert M. Entman. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pembingkai berita dari kedua media tersebut. *Kompas* memilih sikap tidak memihak dan memunculkan dampak reklamasi dalam dua sisi. Sementara itu, sebagai media lokal yang mempertahankan nilai-nilai budaya Bali, *Bali Post* mengambil sikap menolak reklamasi dengan cenderung memberitakan sisi negatif reklamasi Teluk Benoa.

Kata kunci: analisis framing, berita, reklamasi, *Bali Post*, *Kompas*

ABSTRACT

The centralization of the tourism development of Southern Bali requires some infrastructure provisions to support its activities. However, it is struggling with the limited range of area thus leading to a solution of maximally benefiting from the tide area of Benoa Bay through reclamation. The governor's letter of permit for this reclamation has been published, but following the announcement, there have been pros and cons among the Balinese. As print media, the national daily news *Kompas* and local daily news *Bali Post* have shared their contribution by reporting the emerging polemics regarding the issue of Benoa Bay reclamation. This research aims to describe how *Kompas* and *Bali Post* report the news related to Benoa Bay reclamation. The method used for this research is qualitative approach by using constructionist paradigm and Robert M. Entman's framing model. As a result, there are different report framing found in both media. *Kompas* tends to be impartial, bringing up the issue of reclamation impact from two points of view. *Bali Post*, on the other hand, as a local media that preserves Balinese cultural values, tends to reject the idea of reclamation by reporting the bad impact of Benoa Bay reclamation to the environment.

Keywords: framing analysis, report, reclamation, *Bali Post*, *Kompas*

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata di Bali saat ini lebih terkonsentrasi di Bali Selatan. Jika ditelusuri, (*Kompas*, 16/05/2013) “pariwisata pun lebih banyak terpusat di wilayah Bali Selatan, yang dikenal dengan sebutan Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan). Dua pertiga

ekonomi Bali didominasi di wilayah selatan. Tak kurang dari Rp44 triliun kegiatan ekonomi berputar di wilayah ini. Kesenjangan antardaerah terjadi”. Hal ini terjadi karena letak daerah-daerah tersebut dekat dengan Bandar Udara Ngurah Rai, terutama daerah pesisir yang menjadi daya tarik kuat wisatawan.

Keterpusatan pembangunan

daerah pariwisata di bagian selatan Pulau Bali ini memunculkan kebutuhan terhadap infrastruktur pembangunan pariwisata. Namun, pengembangan ini terhalang oleh keterbatasan lahan sehingga memunculkan ide untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan di daerah pasang surut Teluk Benoa.

Niat PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mereklamasi Teluk Benoa mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Badung. Beberapa alasan yang menjadikan pemerintah daerah mempertimbangkan mereklamasi Teluk Benoa adalah isu tentang alih fungsi lahan di Bali yang membuat daratan Pulau Bali menjadi semakin sempit. Selain itu, muncul serangkaian kebijakan Gubernur Bali, dari terbitnya SK Nomor 2138/02-CL/HK/2012 (tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa) yang diduga dilakukan secara diam-diam pada 26 Desember 2012, lantas mendapat penolakan dari masyarakat, baik dari individu, LSM, Akademisi, dan Anggota DPRD.

Selanjutnya, Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa (sering disebut sebagai SK Reklamasi Jilid 2) sekaligus mencabut SK Gubernur Nomor 2138/02-C/HK/2012 (sering disebut SK Reklamasi Jilid 1).

Sebagai lokasi strategis pada jantung Pariwisata Bali, yakni penghubung daerah Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Sanur, Teluk Benoa menjadi perebutan lokasi investasi, kegiatan pelayanan umum, atau infrastruktur penting lainnya. Apalagi

dengan dibangunnya Jalan Tol Bali Mandara yang menjadi penghubung ketiga daerah tersebut. Pihak PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) menyatakan apabila reklamasi ini berhasil akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar pada masa mendatang. Hal ini sebagai dampak langsung perkembangan ekonomi pembangunan yang berwawasan kesejahteraan.

Pemerintah bersikeras melakukan reklamasi karena terdapat pulau-pulau kecil di Teluk Benoa, seperti Pulau Pudut yang memerlukan revitalisasi karena abrasi yang semakin parah. Alih fungsi lahan di Bali membuat deretan Pulau Bali menjadi semakin sempit. Oleh karena itu, Teluk Benoa dipandang pas untuk dibuatkan daratan baru sebagai objek wisata terpadu.

Reklamasi tidak hanya berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat Bali, tetapi juga pada alam dan budaya yang hidup di Bali. Masyarakat Bali mengenal istilah Tri Hita Karana yang menjadi pedoman pembangunan di Bali, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan atau alam. Inilah yang menjadi pedoman masyarakat Bali mengelola sumber daya alam Bali. Mereka berpedoman bahwa laut adalah wujud alam yang harus dilindungi. Adanya reklamasi dikhawatirkan akan berdampak terhadap lingkungan karena Teluk Benoa adalah kawasan konservasi tempat *mangrove*, padang lamun, dan tumbuhan air lainnya tumbuh subur. *Mangrove* berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Kawasan Teluk Benoa juga digunakan sebagai sistem penyangga terumbu karang yang menjadi tempat hidup biota laut.

Terganggunya keseimbangan alam inilah yang ditakutkan oleh masyarakat Bali yang kontra dengan reklamasi Teluk Benoa.

Dalam pemberitaan media lokal maupun nasional, penolakan keras dilakukan oleh komunitas yang mengatasnamakan Forum Rakyat Bali (ForBALI) bersama Jerinx, drummer band Superman Is Dead (SID) asal Bali, serta didukung oleh Sekaa Teruna Teruni (STT) yang terdapat di bale banjar setiap desa adat di Bali. Komunitas Lingkungan Hidup juga aktif melakukan kampanye menolak reklamasi Teluk Benoa yang dapat membahayakan keseimbangan alam Bali. Warga yang menolak reklamasi Teluk Benoa melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Bali dan beberapa wilayah di kota dan kabupaten yang ada di Bali.

Atas dasar perbedaan penafsiran dan pertimbangan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi itulah penulis tertarik meneliti pembingkai yang dilakukan oleh media massa terutama surat kabar dalam pemberitaan reklamasi Teluk Benoa. Banyaknya pro dan kontra reklamasi Teluk Benoa inilah yang membuat isu ini bernilai berita. Dalam studi ini peneliti membahas pemberitaan di koran nasional harian *Kompas* dan koran lokal yaitu *Bali Post*. Pemilihan media massa ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan sudut pandang kedua koran tersebut dalam memberitakan reklamasi Teluk Benoa Bali. Adanya perbedaan sudut pandang tersebut yang mendasari peneliti melakukan kajian ini. Penelitian ini berfokus pada pembingkai berita reklamasi Teluk Benoa di surat kabar *Kompas* dan *Bali Post* edisi 27 Juni 2013 hingga 31 Desember 2014.

Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (Mulyana, 2007). Hoveland dalam Arifin (2010:26) menyatakan “komunikasi adalah proses seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lainnya”, sedangkan Schacter menulis, “komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan”. Shannon dan Weaver menerima unsur penyampaian dan penggunaan lambang dengan memberikan tekanan pada tujuan mempengaruhi.

Komunikasi Massa

Komunikasi massa (*mass communication*) yang dimaksud adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan untuk umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop (Effendy, 2007).

Rakhmat merangkum definisi-definisi komunikasi massa menjadi “komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima serentak dan sesaat” (Ardianto, 2009).

Media Massa

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat

secara massal pula (Bungin, 2013). Adapun media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat melalui produk media massa yang dihasilkan (Tamburaka, 2012).

Bungin (2013) juga menerangkan media massa sebagai institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan (a) sebagai institusi pencerah masyarakat, yaitu media edukasi, (b) selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat, (c) terakhir media massa sebagai media hiburan.

Menurut Ardianto (2009), media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sementara itu, media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film, dan media online (internet).

Surat Kabar sebagai Media Massa Cetak

Surat kabar adalah media massa yang paling tua dibandingkan dengan media massa lainnya, paling banyak dan paling luas penyebarannya, dan paling dalam kemampuan merekam kejadian sehari-hari sepanjang sejarah di negara mana pun di dunia (Effendy, 2007).

Ardianto (2009) menjelaskan, secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan tiga fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah (1) *to inform* (menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa

yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, dan dunia); (2) *to comment* (mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita); (3) *to provide* (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media). Sementara itu, fungsi sekunder media adalah (1) untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun, dan cerita-cerita khusus; (3) melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi, dan memperjuangkan hak.

Surat kabar dapat dikelompokkan pada berbagai kategori. Dilihat dari ruang lingkungannya, surat kabar terbagi menjadi surat kabar lokal, regional, dan nasional. Ditinjau dari bentuknya, ada bentuk surat kabar biasa dan tabloid. Sementara itu, dilihat dari bahasa yang digunakan, ada surat kabar berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah (Ardianto, 2009).

Konstruksi Realitas Media Massa

Dalam penjelasan ontologi konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Berger dan Luckmann menerangkan realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, dan wacana publik sebagai hasil konstruksi sosial (Bungin, 2013).

Substansi “teori konstruksi sosial media massa” terdapat pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung

dengan sangat cepat dan menyebar merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori, dan opini massa cenderung sinis. Posisi “konstruksi sosial media massa” adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas realitas”, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan “konstruksi sosial media massa” atas “konstruksi sosial atas realitas” (Bungin, 2013).

Berita dalam Sudut Pandang Konstruktivis

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Realitas tidak dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat bergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai (Eriyanto, 2013).

Proses Produksi Berita

Sumadria (2008) menyebutkan bahwa proses pencarian dan penciptaan berita dimulai di ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi. Istilah lain rapat proyeksi adalah rapat perencanaan berita, rapat peliputan, atau rapat rutin wartawan di bawah koordinasi koordinator liputan (korlip). Rapat biasanya diselenggarakan sore atau malam hari dan dihadiri seorang atau beberapa redaktur. Dalam rapat proyeksi, setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan. Usulan liputan ini dinyatakan dalam lembar kertas proyeksi yang tersedia. Forum

rapat redaksi memutuskan, apakah usulan liputan reporter itu disetujui, ditunda, atau ditolak.

Menurut Fishman dalam Eriyanto (2013), ada dua kecenderungan studi proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Dalam bentuknya yang umum, pandangan ini sering melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi berita ini dilakukan oleh wartawan di lapangan yang akan memilih berita yang penting dan berita yang tidak penting, peristiwa yang bisa diberitakan dan peristiwa yang tidak bisa diberitakan. Setelah masuk ke tangan redaktur, berita itu akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian yang perlu dikurangi dan bagian yang perlu ditambah.

Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Dalam perspektif ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana wartawan membuat berita. Titik perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu.

Nilai Berita

Sumadria (2008) menyebutkan kriteria umum nilai berita menurut Brooks, Kennedy, Moen, dan Ranly dalam *News Reporting and Editing* menunjuk kepada sembilan hal, yakni keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, informasi, konflik, orang penting, dan kejutan. Beberapa pakar lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi

(*humanity*) dan seks (*sex*) dalam segala dimensi dan manifestasinya termasuk ke dalam kriteria umum nilai berita yang harus diperhatikan dengan saksama oleh para reporter dan editor media massa.

Hierarki Pengaruh Media

Teori hierarki pengaruh media diperkenalkan oleh Shoemaker dan Reese. Teori ini menjelaskan pengaruh internal dan eksternal terhadap isi media. Shoemaker dan Reese dalam bukunya *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content*, menyatakan ada lima faktor yang membentuk konsep pengaruh media. Kelima faktor tersebut adalah pengaruh dari individu pekerja media (*individual level*), pengaruh organisasi media (*organizational level*), pengaruh dari luar media (*outside media level*), pengaruh rutinitas media (*media routines*), dan pengaruh ideologi (*ideology level*) (Shoemaker & Reese, 1996).

Ideologi

Jalbert (2010:309) mengatakan ideologi dianggap sebagai aspek rutin dari produksi sosial kisah berita yang kongruen dengan kepentingan ekonomi dan politik, terorganisasi dan tidak terorganisasi. Media massa dianggap menduduki tempat yang signifikan sebagai pengorganisasi produksi ideologis.

Shoemaker dan Reese melihat ideologi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi

media itu bekerja (Shoemaker dan Reese, 1996: 223).

Hal ini tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan, kekuatan, atau kekuasaan yang ada dalam media tersebut. Kekuasaan tersebut dijalankan dan disebarkan melalui media sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan tidak berpihak. Media bukanlah ranah netral tempat berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang sama dan seimbang (Sudibyo, 2001:55). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa media berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting bagi pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga isi media mencerminkan ideologi pihak yang berkuasa (Shoemaker dan Reese, 1996:229).

Produksi berita berhubungan dengan rutinitas yang terjadi dalam ruang pemberitaan yang menentukan bagaimana wartawan didikte atau dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik organisasi dan ideologi profesional tersebut, ada satu aspek lain yang sangat penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana berita itu bisa bermakna dan berarti bagi khalayak (Eriyanto, 2012:141). Eriyanto juga menjelaskan, di antara berbagai fungsi media dalam mendefinisikan realitas, fungsi pertama dalam ideologi adalah media sebagai mekanisme integrasi sosial.

Eriyanto (2012:154) menambahkan ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana

kita melihat peristiwa dengan kaca mata dan pandangan tertentu, dalam arti luas sebuah ideologi. Seperti yang diungkapkan Sobur, ideologi adalah sebuah kesadaran palsu sehingga bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan akan menggunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk memengaruhi orang lain dengan harapan agar orang lain mengikuti keinginannya.

Analisis Framing Robert M. Entman

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat cara media mengonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat cara peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, hal yang ditekankan adalah isi (*content*) suatu pesan/teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Framing, terutama, melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca (Eriyanto, 2013).

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2013).

Eriyanto (2013) menuliskan ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tidak mungkin

melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda dengan media yang menekankan aspek atau peristiwa yang lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan cara fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan pada *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya.

Framing itu pada akhirnya menentukan bagaimana realitas hadir di hadapan pembaca. *Frame* dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal berbeda apabila wartawan mempunyai *frame* yang berbeda ketika melihat peristiwa tersebut dan menuliskan pandangannya dalam berita (Eriyanto, 2013).

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan

adalah proses membuat isu menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan memengaruhi khalayak dalam memahami realitas (Eriyanto, 2013).

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan diberitakan, apa yang diliput, apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan, dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak. Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Adapun empat perangkat framing Entman, yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose causes*), membuat pilihan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) (Eriyanto, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang berita, terutama surat kabar atau koran adalah hasil dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas, dimana media massa menjadi agen konstruksi. Media bukanlah saluran yang bebas. Media merupakan subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Media secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2013).

Berdasarkan paradigma konstruktivis yang menggunakan analisis

framing, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, berhubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyidikan (Denzim, 2009).

Objek dalam penelitian ini adalah surat kabar nasional dan lokal, yaitu *Kompas* dan *Bali Post*. Kedua media cetak ini dipilih karena secara berkala memberitakan isu reklamasi Teluk Benoa sejak bulan Juni 2013 hingga Desember 2014. Sementara itu, unit analisisnya ialah berita yang terdapat pada surat kabar harian *Kompas* dan *Bali Post*, masing-masing berjumlah lima berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembingkaihan Pemberitaan Reklamasi Teluk Benoa pada Harian *Kompas*

Dalam tiap berita yang diterbitkan, *Kompas* memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu reklamasi Teluk Benoa. Pada berita pertama yang berjudul “Pudut Nyaris Hilang”, *Kompas* memandang reklamasi sebagai masalah ekologi. Pulau Pudut yang digunakan sebagai tempat hidup penyu dan daerah tujuan wisata Desa Tanjung Benoa ini perlahan tergerus oleh abrasi. Luas pulau yang semula 10 hektar kini hanya tinggal satu hektar.

Pada berita kedua yang berjudul, “Dialog Gubernur-Warga Belum Tuntaskan Polemik”, *Kompas* melihat pemerintah menempuh jalur hukum, yakni dialog dengan warga untuk meredakan konflik yang terjadi di masyarakat mengenai simpang siur rencana reklamasi Teluk Benoa. Pada paragraf pertama, *Kompas* menekankan dialog yang dilakukan gubernur dan warga berjalan selama sembilan jam. ‘Sembilan’ jam bukanlah waktu yang sebentar untuk melakukan

dialog. Di sini *Kompas* menekankan begitu kerasnya konflik yang terjadi. Bahkan, dalam waktu selama itu tidak ditemukan titik terang.

Selanjutnya, dalam berita ketiga “Gubernur: Saya Tidak Menjual Bali”, *Kompas* melihat masalah dari pihak pemerintah bahwa semua tuduhan mengenai dampak negatif reklamasi mari kita melihat prospek reklamasi untuk Bali kedepan. Mengutip hasil wawancara wartawan *Kompas* dengan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, *Kompas* menyampaikan bahwa reklamasi bisa menjadi alternatif alih fungsi lahan pertanian. Pulau yang dibuat hasil reklamasi ini nantinya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan perekonomian daerah.

Pada berita keempat yang berjudul “Wacana Simalakama Pulau Dewata”, *Kompas* terlihat begitu berhati-hati mendefinisikan masalah rencana reklamasi Teluk Benoa. *Kompas* memberikan pertimbangan jika reklamasi dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan serta dampak reklamasi sebagai masalah ekonomi dan sosial. Di satu sisi reklamasi bisa menghilangkan mata pencaharian nelayan yang hidup di sekitar kawasan Teluk Benoa, di sisi lain reklamasi tentu akan mendatangkan keuntungan pariwisata yang mengiurkan sehingga pemerintah bersikeras menolak mencabut SK mengenai pemanfaatan lahan di Teluk Benoa.

Terakhir, berita yang berjudul “Pulau-Pulau Buatan Untuk Tujuan Wisata”, *Kompas* lagi-lagi menawarkan dampak positif reklamasi. Reklamasi nantinya akan membuat pulau-pulau buatan di dalam teluk sekitar Pulau Pudut, yang tentunya dapat membangkitkan wisata setempat. Pada berita ini muncul istilah baru, yakni revitalisasi. Revitalisasi bisa dipandang sebuah per-

baikan dari pulau-pulau yang mengalami abrasi daripada pembuatan pulau baru. Wacana yang ingin dibangun *Kompas* bahwa reklamasi tidak seburuk yang dibayangkan orang Bali.

Secara keseluruhan, *Kompas* memilih isu dengan memaparkan fakta dampak baik dan buruk reklamasi Teluk Benoa dari sisi lingkungan, ekonomi, dan pariwisata serta tidak semata-mata berpihak kepada masyarakat lokal atas isu ini. Dalam beritanya juga, *Kompas* beberapa kali memberikan klarifikasi atas tuduhan “Menjual Bali” yang dilayangkan kepada pemerintah Bali, terutama Gubernur Bali, Mangku Pastika. *Kompas* seakan mengajak masyarakat Bali untuk menghentikan polemik dan bersama mencari jalan keluar yang terbaik.

Penonjolan aspek dilakukan *Kompas* dengan menyertakan sebuah foto dalam berita. Seperti berita yang berjudul, “Pudut Nyaris Hilang”, *Kompas* memperlihatkan sebuah foto seorang warga tengah memandang Pulau Pudut yang terancam hilang akibat abrasi yang semakin parah. Selain dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, pulau tersebut digunakan sebagai tempat konservasi penyu. Selanjutnya, pada berita yang berjudul, “Pulau-Pulau Buatan Untuk Tujuan Wisata”, *Kompas* menyertakan grafik konsep revitalisasi kawasan Teluk Benoa. Grafik ini memperlihatkan konsep revitalisasi di Teluk Benoa apabila reklamasi benar-benar dilakukan.

Lebih jelasnya, *Kompas* menggunakan perangkat framing Entman dalam membingkai isu reklamasi Teluk Benoa, yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Berikut adalah uraian cara *Kompas* membingkai isu reklamasi Teluk Benoa berdasarkan elemen tersebut.

Secara umum, *Kompas* terlihat sangat berhati-hati dalam melakukan pemberitaan mengenai reklamasi. Tiga dari lima berita yang dimuat *Kompas* memandang reklamasi sebagai sebuah alternatif masalah ekologi yang sedang dihadapi Teluk Benoa saat ini.

Hal itu terlihat dalam berita yang dimuat pada tanggal 17 Juli 2013. *Kompas* mendefinisikan permasalahan reklamasi Teluk Benoa sebagai masalah ekologi. Pulau Pudut yang berlokasi di Desa Tanjung Benoa disebut mengalami abrasi hebat. Hal ini bisa dilihat pada paragraf pembuka berikut ini.

Keberadaan Pulau Pudut di Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, nyaris hilang sebagai dampak pengerukan sejak 1970 dan abrasi. Luas pulau yang semula 10 hektar itu kini tinggal sekitar satu hektar. Kondisi ini mengancam penyu yang berkembang di pulau itu. (paragraf 1)

Selain itu, reklamasi memiliki prospek yang cukup baik dari segi ekonomi dan pariwisata. Untuk mendukung argumen tersebut, berikut *Kompas* menuliskannya pada edisi 6 Agustus 2013 pada paragraf pembuka ditambah dengan kutipan wawancara Gubernur Bali, sebagai berikut.

.....Made Mangku Pastika meminta masyarakat melihat prospek reklamasi untuk lima tahun mendatang. Reklamasi pulau bisa menjadi alternatif membuka lahan baru untuk lapangan pekerjaan. (paragraf 1)
 “....Yakinlah, saya tidak menjual Bali. Justru Bali itu dibuatkan pulau oleh investor...” kata Pastika. (paragraf 2)

Namun, pada dua berita yang lain *Kompas* melihat reklamasi sebagai

sebuah ancaman yang berdampak pada rusaknya alam serta dapat menghilangkan mata pencaharian nelayan di sekitar Teluk Benoa. *Kompas* memaparkan dampak baik dan buruk reklamasi Teluk Benoa dari segi lingkungan, ekonomi, dan pariwisata dan tidak semata-mata berpihak kepada masyarakat lokal ataupun pemerintah daerah atas isu ini.

Kompas melihat penyebab masalah reklamasi ini dalam dua garis besar. Pertama, timbulnya wacana reklamasi Teluk Benoa disebabkan oleh alam, yakni abrasi yang makin parah dan rusaknya mangrove oleh sampah dan kedua, timbulnya polemik dari rencana reklamasi karena munculnya izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Bali kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Berikut *Kompas* menuliskan pernyataan Wisnu, selaku Manajemen Artha Graha Network yang memimpin rencana reklamasi Teluk Benoa pada 23 Januari 2014.

Wisnu mengatakan, revitalisasi Teluk Benoa bisa melestarikan kawasan mangrove Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai yang terancam sampah dan perambah. Selain itu, Pulau Pudut yang mengalami abrasi parah akan direklamasi. Teluk Benoa juga akan menjadi destinasi wisata baru yang diharapkan meningkatkan kunjungan wisata dan menyerap tenaga kerja. (paragraf 7)

Terkait dengan penyebab kedua, *Kompas* mengutip pernyataan Ni Luh Kartini pada edisi 17 Juli 2013, tentang bagaimana polemik muncul karena munculnya izin prinsip reklamasi.

“Kami menilai Gubernur Bali terlalu terburu-buru memberikan izin prinsip kepada PT TWBI. Apalagi, reklamasi itu memiliki

rentetan pengembangan wisata modern,” kata Ketua BOA, Ni Luh Kartini. (paragraf 10)

Kompas tidak gamblang menyalahkan pemerintah mengeluarkan surat keputusan mengenai pemanfaatan kawasan Teluk Benoa karena daerah tersebut memang perlu dilakukan revitalisasi. Hanya saja, keputusan pemerintah yang dianggap tergesa-gesa memicu timbulnya polemik pada masyarakat Bali. Ditambah lagi Gubernur Bali yang tidak mau mencabut izin prinsip yang telah ia keluarkan.

Kompas mengambil keputusan moral dengan mengimbau masyarakat Bali menunggu hasil kajian benar-benar selesai dan mencari solusi bersama-sama untuk menghentikan polemik yang selama ini terjadi. *Kompas* menyatakan bahwa reklamasi tidak selamanya berdampak negatif apabila dilakukan tepat sasaran, yakni pada pulau yang memang membutuhkan perhatian khusus seperti Pulau Pudut.

Terkait hal tersebut, *Kompas* menuliskan dalam berita edisi 6 Agustus 2013 dengan mengutip pernyataan Made Arjaya, selaku anggota DPRD Bali yang menyarankan agar polemik dihentikan.

“Jikalau kesimpulan akhirnya reklamasi itu tidak layak, mari kita hentikan bersama. Jika layak, mari kita pikirkan pula bagaimana jalan terbaiknya.” (paragraf 8)

Kompas menekankan penyelesaian bahwa Pulau Pudut-lah yang justru membutuhkan perhatian serius karena untuk membangun pulau-pulau buatan akan menimbulkan masalah baru seperti banjir dan naiknya arus laut. Walaupun menyertakan hasil wawancara dengan Gubernur Bali yang menyatakan bahwa reklamasi bukan untuk merusak lingkungan melainkan penyelamatan

lingkungan, *Kompas* juga memberikan pertimbangan lain bahwa kawasan Teluk Benoa dan Nusa Dua mengalami kelebihan hotel. Dalam *masterplan* PT TWBI, kawasan hasil reklamasi Teluk Benoa nantinya akan dibangun hotel dan tempat wisata modern lainnya.

Kompas yang diterbitkan pada 19 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pulau Pudut-lah yang membutuhkan perhatian serius.

Warga justru mengharapkan reklamasi hanya di Pulau Pudut, yang posisinya berada di Teluk Benoa. Alasannya pulau ini pernah menjadi lahan pertanian warga dan habitat penyu sebelum tahun 1970-an. (paragraf 16)

Sementara itu, *Kompas* yang terbit pada 17 Juli 2013 menuliskan pernyataan Mangku Pastika, Gubernur Bali bahwa reklamasi tidak merusak lingkungan.

Pastika mengatakan, izin diberikan kepada PT TWBI sebab ada jaminan reklamasi tidak merusak lingkungan dan mengganggu adat masyarakat. (paragraf 13)

Kompas yang terbit pada 23 Januari 2014 mengungkapkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya pada tahun 2010 yang menyatakan kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya mengalami kelebihan hotel.

“.....ini didasarkan pada penelitian Kementerian Pariwisata dan Budaya pada 2010 yang menyatakan kawasan setempat kelebihan hotel. Pembangunan kawasan terpadu Teluk Benoa dinilai sebagai inkonsistensi kebijakan gubernur. (paragraf 8) Dari semua pemaparan mengenai

hierarki pengaruh media, level pengaruh organisasi dan pengaruh ideologi yang mendominasi bagaimana *Kompas* melakukan pemberitaan terkait isu reklamasi Teluk Benoa. *Kompas* mengonstruksi realitas berdasarkan keputusan redaksional bahwa pemberitaan *Kompas* sangat berhati-hati dalam memaparkan fakta-fakta terkait isu reklamasi. Dengan demikian, *Kompas* ingin masyarakat Bali sendiri yang menilai apakah reklamasi memang benar layak atau tidak dilakukan. Sebagai media nasional, *Kompas* tidak mau gegabah dengan memberikan kritik yang membabi buta. Melainkan memberikan pemaknaan peristiwa dan mencari solusi untuk kemanusiaan.

Pembingkaihan Pemberitaan Reklamasi Teluk Benoa di Harian *Bali Post*

Terkait perangkat framing Entman yang pertama yakni pendefinisian masalah, secara umum *Bali Post* melihat masalah reklamasi Teluk Benoa sebagai sesuatu yang negatif. Ini terlihat dari kelima berita yang dipilih, *Bali Post* tidak pernah mengangkat atau menampilkan dampak positif reklamasi. *Bali Post* membingkai reklamasi sebagai masalah hukum, kehancuran lingkungan, pariwisata, ekonomi, bahkan moral. Penulis terlebih dahulu akan membahas cara *Bali Post* mendefinisikan masalah reklamasi ini.

Dalam berita pertama yang berjudul “Investor Berlomba Ingin Duduki Teluk Benoa”, *Bali Post* menjelaskan bahwa Teluk Benoa sudah lama menjadi incaran para investor. Dalam pendefinisian masalahnya, *Bali Post* langsung menyebutkan bahwa ada empat investor yang berlomba ingin menduduki Teluk Benoa dengan sasaran membangun akomodasi pariwisata.

Pada berita kedua yang berjudul “Bali di Ambang Kehancuran”, *Bali Post* menyampaikan dengan sangat jelas bahwa reklamasi akan merusak alam Bali. Reklamasi di sini bukan lagi masalah lingkungan atau ekonomi semata, tetapi moral orang Bali yang mulai goyah dan tergiur akan materi sehingga menjual tanah sendiri. Dasar masalah reklamasi ada pada lemahnya moralitas orang Bali.

Selanjutnya pada berita ketiga “Lawan Kehendak Rakyat, Turunkan Gubernur Pastika”, *Bali Post* membingkai masalah reklamasi sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah daerah tetap meneruskan rencana reklamasi ketika rakyat Bali sebagian besar memilih sikap menolak. Pelanggaran hukum yang dimaksud di sini adalah pemerintah daerah sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat, tapi tidak memihak pada rakyat. Kedua, pelanggaran dengan mengindahkan kajian Unud yang menyatakan bahwa reklamasi tidak layak. Ketiga, SK yang dikeluarkan gubernur mengenai pemanfaatan kawasan Teluk Benoa tidak sah. Terakhir, adanya indikasi suap yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan bersikukuh tetap menjalankan rencana reklamasi di tengah kemelut yang timbul pada masyarakat Bali.

Pada berita keempat yang berjudul “SBY Jangan Hancurkan Alam Bali” terlihat *Bali Post* tidak menyetujui keputusan Presiden SBY yang masih menjabat kala itu untuk merevisi Perpres Sarbagita. *Bali Post* memandang revisi Perpres Sarbagita adalah langkah cepat untuk menghancurkan alam Bali. Perpres Sarbagita tidak perlu diotak-atik lagi, apalagi menambahkan PT TWBI ke dalam MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan*

Ekonomi Indonesia). Revisi ini akan memperlihatkan model penghancuran alam lingkungan Bali dengan alasan ekonomi dan kemajuan pariwisata.

Terakhir berita *Bali Post* berjudul “Massa Desak Dewan Bentuk Pansus: Bongkar Aktor di Balik Reklamasi”, *Bali Post* dengan sangat gamblang menyiratkan bahwa dalam reklamasi terdapat banyak aktor yang terlibat sehingga proyek ini berjalan dengan mulus. Pembungkahan berita oleh *Bali Post* lebih kepada penolakan masyarakat Bali untuk menolak reklamasi yang diwujudkan dalam bentuk demo di depan Gedung DPRD Provinsi Bali.

Dari ulasan tersebut, *Bali Post* memperlihatkan diri berada pada pihak yang kontra dengan adanya reklamasi. Dari judul-judul yang diperlihatkan, sudah terlihat adanya perlawanan atau ketidaksetujuan *Bali Post* dengan reklamasi. Judul yang diberikan *Bali Post* pada tiap beritanya terlihat sebagai sebuah provokasi yang bernada negatif.

Berangkat dari konsep Tri Hita Karana, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan harus seimbang dan tetap berlangsung dengan baik. Konsep dasar tersebut yang harus diperhatikan dalam pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Bali. *Bali Post* memandang reklamasi akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan karena Teluk Benoa adalah kawasan suci, yaitu laut. Reklamasi akan memengaruhi lingkungan geologi alam di kawasan itu. Hal ini terjadi karena melihat peristiwa sebelumnya di Pulau Serangan. Di pulau tersebut pernah dilakukan reklamasi. Keputusan *Bali Post* untuk kontra terhadap reklamasi juga berdasarkan

kajian Unud yang menyatakan bahwa reklamasi tidak layak.

Bali Post melihat isu reklamasi Teluk Benoa sebagai sebuah keputusan yang salah dari pemerintah daerah Bali. *Bali Post* memilih isu penolakan rencana reklamasi dari sekian banyak fakta yang ada di lapangan. *Bali Post* banyak menyoroti perlawanan rakyat Bali yang tidak setuju dengan adanya reklamasi. *Bali Post* mengonstruksi realitas reklamasi sebagai sebuah ancaman sehingga yang terlihat di masyarakat bahwa reklamasi sama sekali tidak mendatangkan dampak positif.

Penonjolan aspek dilakukan *Bali Post* dengan menempatkan isu reklamasi di halaman pertama surat kabar, sekaligus menjadi *headline* dan ditambah pemilihan judul yang begitu provokatif pada setiap beritanya. Hal tersebut merupakan cara yang dilakukan *Bali Post* untuk membuat berita ini terlihat mencolok. *Bali Post* juga menampilkan grafis pada salah satu beritanya sehingga membuat isu ini begitu kuat.

Berdasarkan perangkat framing Entman, yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian, berikut adalah uraian bagaimana *Bali Post* membungkai isu reklamasi Teluk Benoa berdasarkan elemen tersebut.

Bali Post melihat masalah reklamasi Teluk Benoa sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini terlihat dari kelima berita yang dipilih. *Bali Post* tidak pernah mengangkat atau menampilkan dampak positif reklamasi. *Bali Post* membungkai reklamasi sebagai masalah hukum, kehancuran lingkungan, pariwisata, ekonomi, bahkan moral.

Pada 6 Juli 2013 *Bali Post* menuliskan bahwa Teluk Benoa adalah

incaran investor.

Kawasan Teluk Benoa saat ini benar-benar menjadi incaran para investor. Mereka seolah berlomba ingin “menduduki” perairan itu dengan melakukan reklamasi. Sasarannya guna membangun akomodasi pariwisata dan bangunan komersial lainnya. (paragraf 1)

Pada 16 Agustus 2013 *Bali Post* menyatakan bahwa reklamasi adalah masalah moral.

Pariwisata Bali tak lagi punya roh. Bahkan mulai bertransformasi dan bermutasi menjadi pariwisata terpadu yang tidak berakar pada budaya Bali. Lingkungan Bali juga dihancurkan dan Tri Hita Karana masih sebatas slogan. Demikian pula pertanian mulai ditinggalkan, diabaikan dan terpinggirkan. Semua ini akan makin mempercepat kehancuran Bali. (paragraf 1)

Pada 8 September 2013 *Bali Post* menuliskan pernyataan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Tabanan, Ida Bagus Raka Wiryanatha yang menyatakan bahwa reklamasi adalah masalah hukum.

“Kalau sudah menentang rakyatnya sendiri yang memilih dengan tetap ngotot melakukan reklamasi, turunkan saja. Buat apa punya pemimpin yang menentang rakyatnya sendiri,” tegasnya. (paragraf 2)

Pada 28 Desember 2013 *Bali Post* menyatakan bahwa lolosnya izin reklamasi adalah sebuah kesalahan yang berdampak pada rusaknya alam Bali.

Wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merevisi Perpres Sarbagita untuk

memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa terus menuai kecaman. (paragraf 1)

“Ini adalah upaya penghancuran alam dan budaya Bali menggunakan instrumen hukum....”, kata Ketua Forum Peduli Bali Dwipa (FPBD) Gede Bangun Nusantara. (paragraf 1)

Bali Post melihat penyebab masalah adanya wacana rencana reklamasi Teluk Benoa ini adalah investor dan Pemerintah Provinsi Bali, terutama Gubernur Bali Made Mangku Pastika serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjabat. *Bali Post* selalu memunculkan sosok Gubernur Bali sebagai aktor utama penyebab reklamasi dalam tiap berita yang diterbitkan.

Pada 16 Agustus 2013 *Bali Post* menuliskan pernyataan I Gusti Made Sutjaja, selaku Guru Besar Fakultas Sastra Unud, yang menyatakan bahwa investor adalah aktor utama munculnya wacana reklamasi Teluk Benoa.

“Pengerukan laut ini seperti urusan makelar tanah. Makelar telah mendomplengi akselerasi pariwisata yang begitu cepat. Omong kosong dengan pariwisata terpadu. Mereka nantinya hanya akan jual tanah di kawasan hasil pengerukan itu,” kritiknya. (paragraf 4)

Pada 28 Desember 2013 *Bali Post* menyatakan bahwa penyebab terjadinya wacana reklamasi adalah pemerintah dengan menghapus status konservasi Teluk Benoa.

“.....upaya menghapus status konservasi Teluk Benoa untuk memuluskan reklamasi merupakan bentuk eksploitasi Bali secara terstruktur, terencana,

dan masif oleh pemerintah”.
(paragraf 2)

Sebagai surat kabar yang menjunjung tinggi dan mempertahankan Ajeg Bali, yang di dalamnya terdapat kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Bali, *Bali Post* menampilkan hal tersebut dalam berita-beritanya. *Bali Post* ingin menyadarkan orang Bali agar kembali kepada hakikat bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk pembangunan harus berpedoman dan berlandaskan pada Tri Hita Karana. Apabila sekarang konsep ada yang mengganggu, sekalipun pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan, masyarakat harus protes.

Saat *Bali Post* melihat reklamasi sebagai sebuah hal yang dapat merusak alam Bali dengan berkedok kemajuan ekonomi dan pembangunan pariwisata, *Bali Post* memperlihatkan keputusan moral yang diambil dari adanya reklamasi dengan memberikan argumen bahwa jika reklamasi benar-benar dilaksanakan, pariwisata yang tumbuh di Bali akan berbasis pada *sex, drugs, dan gambling*. Bali menjadi destinasi wisata nasional bahkan internasional bukan berdasar pada banyaknya tempat wisata modern, tapi budaya dan adat yang masih kental di Bali.

Pernyataan mengenai keputusan moral *Bali Post* secara tersirat tertuang dari hasil wawancara narasumber pada edisi 16 Agustus 2013 yang menyebutkan apabila reklamasi tetap dilanjutkan, pariwisata Bali nantinya akan mengarah kepada tiga hal, yakni *sex, drugs, dan gambling*. Berikut petikan wawancaranya.

“Apa di sana akan dibangun seperti di Genting Malaysia? Pariwisata Bali nantinya hanya

akan mengarah pada tiga hal yakni *sex, drugs, dan gambling*,” kata I Gusti Made Sutjaja mengingatkan. (paragraf 5)

I Gusti Made Sutjaja juga menyampaikan kritikan tajam yang terbit di *Bali Post* pada 16 Agustus 2013. Sutjana menyatakan harus ada introspeksi dari pemimpin dan masyarakat Bali itu sendiri.

Ini mestinya menjadi bahan introspeksi para pemimpin maupun masyarakat Bali sendiri. Jika kebudayaan Bali tercerabut dan Bali benar-benar hancur, mari siap-siap bertransmigrasi,” pungkask. (paragraf 6)

Keputusan moral *Bali Post* juga disampaikan oleh Sukarta yang juga ketua DPD Gerindra Provinsi Bali pada 28 Desember 2013. Dia mengatakan bahwa reklamasi harus dilihat dari dampaknya pada keajegan lingkungan, adat budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Untuk itu, sudah sepatutnya masyarakat Bali kembali mengingat konsep Tri Hita Karana sebagai dasar pembangunan pariwisata Bali.

“.....Kearifan lokal di Bali harus dipertimbangkan dan dipegang teguh. Kita punya konsep ulu teben, Tri Hita Karana, ada budaya. Ini harus dijadikan landasan dalam setiap pembangunan di Bali,” pungkasknya. (paragraf 6)

Bali Post menekankan pada penyelesaian bahwa SK gubernur mengenai pemanfaatan kawasan Teluk Benoa harus dicabut. Semua pelanggaran mengenai keluarnya izin prinsip yang tidak sah harus diproses secara hukum. Termasuk adanya indikasi kasus suap. *Bali Post* memberikan argumen bahwa seharusnya masyarakat melaporkan kasus ini kepada pihak

kepolisian. Sebaliknya, ada inisiatif dari kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan. Pihak penegak hukum harus objektif dengan melakukan penyelidikan tanpa pandang bulu.

Bali Post pada 29 November 2014 menuliskan pernyataan aktivis Gendo yang mendesak pihak terkait untuk membongkar aktor di balik reklamasi.

Menurut Gendo, kalau DPRD Bali memang memiliki keinginan politik yang baik, maka pansus reklamasi seharusnya tidak perlu dihindari. Apalagi dengan dibentuknya pansus, dewan seharusnya bisa membongkar aktor di balik rencana reklamasi Teluk Benoa. (paragraf 5)

Pemberitaan reklamasi di *Bali Post* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang termasuk dalam hierarki pengaruh media. Label pengaruh yang paling menonjol dalam *Bali Post* adalah pengaruh organisasi media dan ideologi. Setelah itu barulah faktor luar organisasi media, rutinitas media, dan pekerja media. Faktor organisasi media begitu berpengaruh mengingat keputusan terkait kemunculan berita reklamasi Teluk Benoa di *Bali Post* terletak pada redaksional serta ideologi yang dianut oleh *Bali Post*. Ideologi *Bali Post* adalah Pancasila. Hal ini tertera dalam visi *Bali Post*, yaitu menjadi pers Indonesia, pers Pancasila, menjadi suluh Indonesia bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Pengemban Pengamal Pancasila. Hal ini berarti *Bali Post* ingin mempertahankan apa yang disebutkan dalam Pancasila, termasuk juga mempertahankan Ajeg Bali yang di dalamnya terdapat kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Bali. *Bali Post* menampilkan hal itu dalam berita-beritanya. *Bali Post* ingin

menyadarkan orang Bali agar kembali kepada hakikat bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk pembangunan harus berpedoman pada Tri Hita Karana. Muncullah berita-berita yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan beberapa hal mengenai perbedaan pbingkai pemberitaan reklamasi Teluk Benoa di harian *Kompas* dan *Bali Post* edisi Juni 2013 sampai Desember 2014. Simpulan ini sekaligus menjawab tujuan awal penelitian, yaitu mengetahui pbingkai berita reklamasi Teluk Benoa di harian *Kompas* dan *Bali Post*.

1. *Kompas* sangat berhati-hati dalam membingkai isu reklamasi Teluk Benoa. *Kompas* selalu memperlihatkan reklamasi dalam dua sisi, pro dan kontra. Hal tersebut didasarkan pada keputusan redaksional yang selalu mengingatkan sikap kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena setiap pembangunan dengan skala besar akan dilakukan akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Kehati-hatian ini terlihat dari bagaimana *Kompas* mendefinisikan masalah reklamasi Teluk Benoa sebagai masalah ekologi dan ekonomi serta melihat reklamasi dalam dua sisi, yakni positif dan negatif. *Kompas* melihat penyebab reklamasi Teluk Benoa dalam dua garis besar. Pertama, timbulnya wacana reklamasi Teluk Benoa disebabkan oleh alam, yakni abrasi yang makin parah dan rusaknya mangrove oleh sampah. Kedua, timbulnya polemik rencana reklamasi disebabkan munculnya izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Bali kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).

Kompas menyatakan keputusan moral dengan mengimbau masyarakat Bali menunggu hasil kajian benar-benar selesai dan mencari solusi bersama-sama untuk menghentikan polemik yang selama ini terjadi. Penyelesaian yang ditekankan *Kompas* yaitu Pulau Pudut-lah yang justru membutuhkan perhatian serius karena abrasi hebat bisa menyebabkan pulau tersebut tenggelam.

2. *Bali Post* membingkai isu reklamasi Teluk Benoa dengan memunculkan banyak fakta mengenai dampak negatif reklamasi Teluk Benoa. *Bali Post* mengambil sikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Sesuai dengan ideologi *Bali Post*, yakni Pancasila, *Bali Post* melihat reklamasi hanya akan menguntungkan investor bukan masyarakat lokal. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Ketidaksetujuan *Bali Post* dengan rencana reklamasi terlihat dari bagaimana *Bali Post* mendefinisikan masalah reklamasi sebagai masalah hukum dan masalah moral. *Bali Post* melihat pemerintah daerah Bali, khususnya Gubernur Bali, mengeluarkan izin prinsip yang cacat hukum dan terkesan tergesa-gesa. *Bali Post* juga melihat reklamasi sebagai masalah moral karena prihatin dengan masyarakat Bali yang kini mudah tergoda rayuan investor. *Bali Post* memperkirakan penyebab masalah reklamasi Teluk Benoa disebabkan izin prinsip yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa oleh Gubernur Bali. Dalam pemberitaannya, *Bali Post* selalu memunculkan aktor, yakni Gubernur Bali sebagai dalang terjadinya reklamasi Teluk Benoa. Sementara itu, *Bali Post* mengambil keputusan moral dengan meminta agar orang Bali kembali pada hakikatnya

bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk pembangunan harus berpedoman dan berlandaskan pada Tri Hita Karana. *Bali Post* menekankan penyelesaian dengan mencabut SK gubernur mengenai pemanfaatan kawasan Teluk Benoa. Semua pelanggaran mengenai keluarnya izin prinsip yang tidak sah harus diproses secara hukum. *Bali Post* juga mengimbau sudah seharusnya warga Bali melakukan introspeksi diri jangan tergoda dengan materi hingga akhirnya merusak alam dan lingkungan Bali.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan.

1. Dalam menuliskan berita mengenai konflik, hendaknya *Bali Post* lebih netral, isi berita berimbang, dan tidak menyertakan materi berita yang dapat memprovokasi masyarakat, khususnya masyarakat Bali.

2. *Bali Post* juga seharusnya menyertakan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bukan hanya wawancara narasumber, apalagi yang kredibilitasnya diragukan.

3. Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada pembaca umumnya masyarakat agar lebih cerdas dan selektif dalam memilih berita serta lebih kritis dalam memahami isi berita sehingga tidak serta merta mengikuti sudut pandang yang ditulis media tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah. (2009). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Arifin, Anwar. (2010). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Group.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Rini, Yuliani dkk. (2013). "Potensi Ekonomi Sisi Buram Di Balik Pesona Bali". *Kompas*, 16 Mei 2013.
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese. (1996). *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. USA: Longman.
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudiby, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Sumadria, Haris. (2008). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.